

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PENGENDALIAN
INTERNAL DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* TERHADAP
PENCEGAHAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
(STUDI PADA DESA NGAWEN KABUPATEN DEMAK)**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :
Rifki Muhammad Azizi
Nim : 31401900139**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Persetujuan Penelitian Skripsi

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PENGENDALIAN INTERNAL
DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN**

(Studi Kasus Pada Desa Ngawen Kabupaten Demak)

Disusun Oleh :

Rifki Muhammad Azizi

Nim : 31401900139

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

Semarang, 14 Januari 2026

Pembimbing



Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK. 211414026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PENGENDALIAN INTERNAL
DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN**

Disusun Oleh :

Rifki Muhammad Azizi

31401900139

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 2026

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji

Hani Werdi Aprivanti, S.E., M.Si., Ak., CA. Fulan

NIK.

NIK.

Fulan

NIK.

Skrpsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana

Manajemen Tanggal 2026

Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D

NIDN.0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Rifki Muhammad Azizi
NIM : 31401900139
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN”** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 2026

Yang menyatakan,

Rifki Muhammad Azizi

NIM. 31401900139



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifki Muhammad Azizi

NIM : 31401900139

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyerahkan hasil karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul : **“PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2026

Yang Memberi Pernyataan

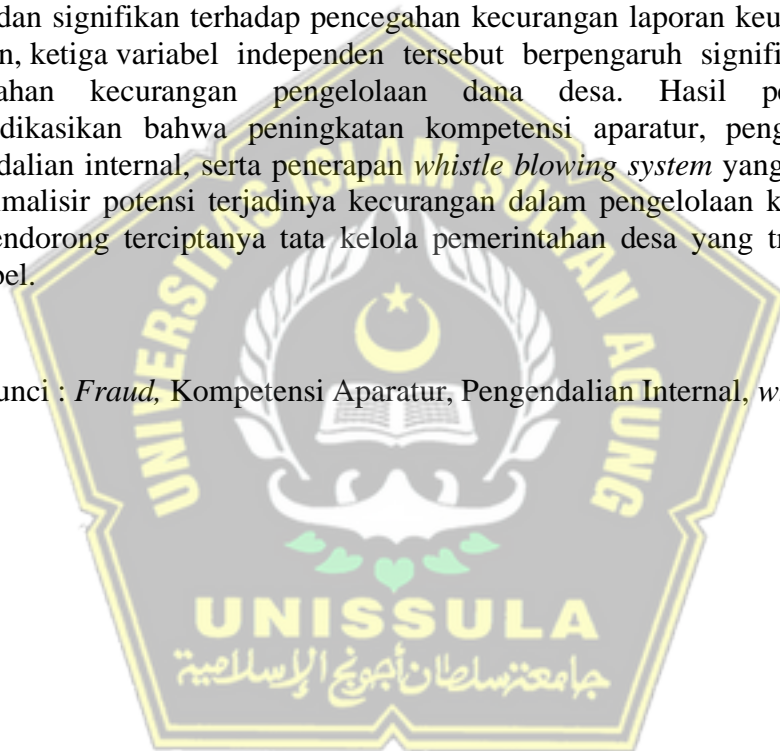
RIFKI MUHAMMAD AZIZI

NIM. 31401900139

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan *whistle blowing system* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan pada Desa Ngawen Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pengujian instrumen meliputi uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Demikian pula, *whistle blowing system* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan *whistle blowing system* yang efektif dapat meminimalisir potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : *Fraud*, Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal, *whistle Blowing System*



ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of apparatus competence, internal control systems, and the whistleblowing system on the prevention of financial statement fraud in Ngawen Village, Demak Regency. This research employs a quantitative approach using a survey method by distributing questionnaires to village officials. The data analysis technique used is multiple linear regression, with instrument testing including validity, reliability, and classical assumption tests. The results indicate that apparatus competence has a positive and significant effect on fraud prevention. The internal control system also has a positive and significant effect on fraud prevention. Likewise, the whistleblowing system is proven to have a positive and significant effect on the prevention of financial statement fraud. Simultaneously, the three independent variables significantly influence the prevention of fraud in village fund management. These findings suggest that improving apparatus competence, strengthening internal control systems, and implementing an effective whistleblowing system can minimize the potential for fraud in village financial management and promote transparent and accountable village governance.

Keywords: *Fraud, Apparatus Competence, Internal Control, Whistleblowing System*



KATA PENGANTAR

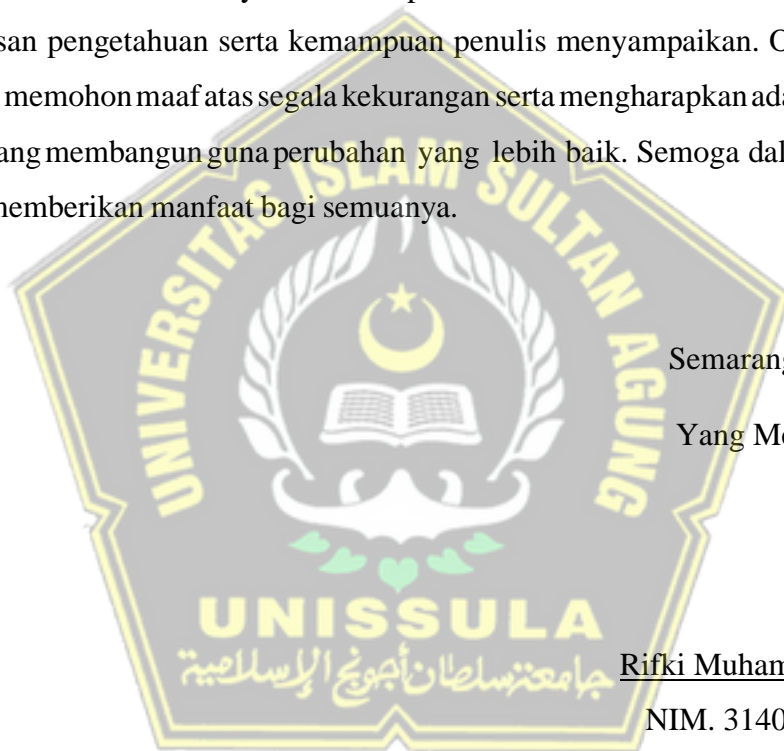
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan berkat rahamat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, shabat serta umat Rasulullah SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana satu (S1) jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam skripsi ini tidak lepas mendapatkan bantuan dalam bentuk nasihat dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Tri Wikaningrum, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang siap sedia memberikan nasihat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Lutfi Nurcolis, S.T., S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua orang tua, beliau sangatlah berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Penulis sangat berterimakasih atas segala motivasi serta dukungan selalu, perhatian yang selalu memberikan do'a semangat hingga skripsi ini telah selesai.
6. Teruntuk pemilik NIM 33102300116 yang telah memberi support dan selalu menjadi partner bahagia dan di masa-masa sulit penulis, yang selalu memberikan semangat, dukungan, menjadi pendengar dan selalu membantu memberi masukan saat pembuatan skripsi.

7. Para teman-teman. Adam Sasando dan Ahmad Nurul Hakim yang telah memberikan motivasi dan semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini hingga menyelesaikan skripsi.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan usulan skripsi ini.
9. Terakhir kepada manusia-manusia yang selalu bertanya “kapan wisuda??”

Semoga amal jerih payah semuanya mendapatkan hikmah dan rezeki dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan ini masih belum sempurna. Karena terbatas pengetahuan serta kemampuan penulis menyampaikan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan serta mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna perubahan yang lebih baik. Semoga dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya.



Semarang, 2026

Yang Menyatakan

Rifki Muhammad Azizi

NIM. 31401900139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.5.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Fraud Triangle.....	10
2.1.2 Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	13
2.1.3 Kompetensi Aparatur.....	17
2.1.4 Pengendalian Internal.....	22
2.1.5 Whistle Blowing System.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30

2.3 Hipotesis Penelitian.....	34
2.3.1 Hubungan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Ngawen Kabupaten Demak	34
2.3.2 Hubungan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dana Desa Ngawen Kabupaten Demak.....	36
2.3.3 Hubungan <i>Whistle Blowing System</i> Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Ngawen Kabupaten Demak.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Populasi dan Sampel.....	40
3.2.1 Populasi.....	40
3.2.2 Sampel.....	43
3.3 Sumber dan Jenis Data	43
3.4 Metode Pengumpulan Data	44
3.5 Variabel dan Indikator.....	46
3.5.1 Variabel Kompetensi Aparatur	46
3.5.2 Variabel Pengendalian Internal.....	47
3.5.3 Variabel <i>Whistle Blowing System</i>	47
3.5.4 Variabel Pencegahan Kecurangan	48
3.6 Teknik Analisis Data	52
3.6.1 Uji Instrumen	52
3.6.2 Analisis Regresi Berganda.....	52
3.6.3 Uji Hipotesis	53
3.6.4 Analisis Koefisien Determinan	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Desa Ngawen Kecamatan Wedung	55
4.1.1 Profil Desa Ngawen Kecamatan Wedung.....	55
4.1.2 Visi Dan Misi Desa Ngawen Kecamatan Wedung.....	57
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Ngawen Kecamatan Wedung	59
4.2 Hasil Penelitian.....	59

4.2.1 Karakteristik Responden.....	59
4.2.2 Uji Instrumen	62
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	65
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	68
4.2.5 Uji Hipotesis	69
4.2.6 Uji Koefisien Determinan (R^2)	72
4.3 Pembahasan	72
4.3.1 Kompetensi Aparatur Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	72
4.3.2 Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	75
4.3.3 <i>Whistle Blowing System</i> Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	78
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	83
5.3 Keterbatasan Penelitian	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Data Narasumber	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2 Indikator Variabel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	59
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	65
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas.....	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi	69
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	70
Tabel 4.11 Hasil Uji F	72
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinan	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Fraud Triangle Theory</i> oleh Cressey	10
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1 Peta Desa Ngawen Kec. Wedung	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.2 Data Penduduk Desa Ngawen Kec. Wedung.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan anggaran yang diperoleh melalui dana desa. Tujuan dari dana desa ini adalah untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pengelolaan dana desa tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk potensi terjadinya kecurangan (Puspita, 2022).

Pengelolaan keuangan desa berlangsung selama satu tahun anggaran, biasanya dimulai pada 1 Januari hingga 31 Desember. Selama periode ini, kepala desa bertanggung jawab mengelola dana desa. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan ini harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Suandani, 2024).

Kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan desa. Beberapa bentuk kecurangan yang sering terjadi antara lain penyalahgunaan anggaran, pemalsuan dokumen, *mark-up* harga, dan pelanggaran prosedur administrasi. Untuk meminimalisir kecurangan,

diperlukan aparatur desa yang kompeten, sistem pengendalian internal yang kuat, dan mekanisme pengawasan yang efektif seperti *whistle blowing system*.

Menurut Standar Auditing 240 dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2021), Adapun Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan definisi fraud ialah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada aplikasi kekerasan atau ancaman kekerasan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh partai dan organisasi untuk memperoleh kekayaan uang, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau hilangnya layanan, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis (Rozak, 2022).

Beberapa hal yang berperan penting dalam mencegah kecurangan ialah faktor kompetensi yang dimiliki oleh aparatur, pengendalian internal, dan *whistle blowing system* (Suandani, 2024). Kompetensi adalah ladsan kepribadian seseorang dalam berperilaku, berfikir dan bersifat. Dengan kata lain, kompetensi merupakan kompetensi seseorang yang ditunjukkan pada saat mereka bekerja sehari-hari.

Kompetensi sumber daya manusia meliputi kapasitasnya, yaitu kemampuan individu, organisasi (kelembagaan) atau sistem untuk menjalankan fungsi atau wewenangnya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan guna mencapai kinerja, agar dapat menghasilkan keluaran dan hasil. Dalam mengelola keuangan desa, pemerintahan desa harus memiliki kompetensi sumber daya manusia bisa berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, mengikuti pelatihan, memahami akuntansi dan

keuangan desa serta memahami aturan dan tata cara pengelolaan keuangan desa serta tujuan dana yang diberikan oleh Lembaga Pemerintah. Hal ini diperlukan agar tidak dapat terjadi kesalahan pada pengelolaan keuangan desa serta ketidaksesuaian laporan yang dibuat yang didasarkan pada standar pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Biduri, 2022).

Tingkat kompetensi sumber daya manusia perlu diperhatikan karena seseorang yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan dalam melakukan pekerjaannya maka akan berdampak pada kinerja yang tidak baik. Seorang yang tidak dapat mencapai kinerja yang baik akan menimbulkan masalah salah satunya yaitu dengan melakukan kecurangan. Sistem dan prosedur kerja yang sebaik apapun tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila individu yang melaksanakannya tidak memiliki kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dipertimbangkan mengenai tingkat kompetensi berupa pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk mengerjakan pekerjaan tertentu (Biduri, 2022).

Penelitian oleh Sarwenda Biduri (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Aparatur yang terlatih cenderung lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana. Namun, penelitian lain oleh Ni Kadek Purnama Dewi (N. K. P. Dewi, 2022) menemukan bahwa meskipun kompetensi aparatur desa tinggi, kecurangan tetap terjadi karena lemahnya pengawasan eksternal. Ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur saja tidak cukup untuk mencegah kecurangan, melainkan harus didukung oleh sistem pengawasan yang efektif.

Pencegahan *fraud* dalam suatu lembaga juga dapat dilakukan dengan memperhatikan sistem pengendalian internal. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketika sistem pengendalian internal suatu lembaga buruk maka akan mendorong seseorang melakukan penyimpangan. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien, serta untuk melindungi aset dari penyalahgunaan (Situmeang, 2022).

Menurut penelitian oleh Tri Nurindahyati Yulian (2022) sistem pengendalian internal yang baik mampu mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Prosedur pengendalian yang ketat, audit internal yang rutin, dan kebijakan yang jelas menjadi beberapa elemen penting dalam sistem pengendalian internal. Namun, penelitian oleh Muhammad Iqbal Prakoso (2023) menunjukkan hasil yang berbeda. Meskipun sistem pengendalian internal sudah diterapkan, kecurangan masih terjadi karena kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal harus diiringi dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran aparatur desa mengenai fungsinya.

Whistle blowing system adalah mekanisme yang memungkinkan individu untuk melaporkan tindakan yang tidak etis atau ilegal tanpa takut akan adanya tindakan balasan. Sistem ini dapat berfungsi sebagai alat pencegahan yang efektif dengan memberikan saluran bagi aparatur dan masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan. Definisi *whistleblowing* yang disampaikan oleh Effendi melalui Anlilua (2023) adalah tindakan mengungkapkan tindakan pelanggaran hukum, korupsi, atau perbuatan lain yang berpotensi merugikan perusahaan dan pihak-pihak yang terkait. Informasi ini bisa disampaikan oleh individu atau badan hukum yang berada di dalam organisasi atau di luar organisasi kepada pimpinan perusahaan agar tindakan dapat diambil terhadap pelanggaran yang dilaporkan. Salah satu upaya untuk melakukan *whistle blowing system* yaitu dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak didalam organisasi maupun luar organisasi. Sistem ini merupakan tempat atau wadah bagi *whistleblower* untuk melaporkan tindak kecurangan/fraud (Anlilua, 2023).

Menurut penelitian oleh Fadillah (2024), *whistle blowing system* mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian oleh Anlilua (2023) menemukan bahwa *whistle blowing system* tidak efektif jika tidak didukung oleh perlindungan yang memadai bagi pelapor. Banyak aparatur desa dan masyarakat yang enggan melaporkan kecurangan karena takut akan adanya tindakan balasan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *whistle blowing system* tergantung pada sejauh mana perlindungan terhadap pelapor dapat dijamin.

Desa Ngawen merupakan salah satu desa di Kabupaten Demak yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, dan industri rumah tangga. Desa ini dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Desa Ngawen dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan budaya lokal yang masih terjaga dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Ngawen juga menerima alokasi dana desa yang cukup signifikan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa di Desa Ngawen memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, seperti banyak desa lainnya, Desa Ngawen juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana desa, termasuk risiko terjadinya kecurangan atau fraud. Kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat berupa penyalahgunaan anggaran, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran prosedur administrasi yang dapat merugikan masyarakat desa secara keseluruhan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting bagi Desa Ngawen untuk memastikan bahwa aparatur desanya memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi aparatur desa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan efisien. Aparatur desa yang kompeten dapat memastikan bahwa dana desa dikelola dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan *whistle blowing system* merupakan faktor-faktor yang penting dalam mencegah kecurangan pengelolaan dana desa. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, yang mengindikasikan bahwa setiap faktor tersebut belum tentu efektif jika diterapkan secara terpisah. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal dan *Whistle Blowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Pada Desa Ngawen Kabupaten Demak)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat *research gap* diantara beberapa penelitian tentang pengaruh kompetensi aparatur, pengendalian internal dan *whistle blowing system* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Sehingga rumusan masalah yang harus diketahui adalah bagaimana pengaruh kompetensi aparatur, pengendalian internal serta *whistle blowing system* terhadap pencegahan kecurangan pada laporan keuangan di Desa Ngawen Kabupaten Demak?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Desa Ngawen?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Desa Ngawen?

3. Apakah *whistle blowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Desa Ngawen?
4. Apakah kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan *whistle blowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Desa Ngawen?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Desa Ngawen.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Desa Ngawen.
3. Untuk menganalisis pengaruh *whistle blowing system* terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Desa Ngawen.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan *whistle blowing system* secara simultan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Desa Ngawen.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan, dengan

memperkaya literatur tentang pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan *whistle blowing system*.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan masukan dalam peningkatan kompetensi aparatur desa, memperbaiki sistem pengendalian internal, dan mengimplementasikan *whistle blowing system* untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi Aparatur Desa

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur desa tentang pentingnya kompetensi, sistem pengendalian internal, dan *whistle blowing system* dalam mencegah kecurangan.

3. Bagi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa melalui mekanisme *whistle blowing system*.

4. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut yang terkait dengan topik ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Fraud Triangle

Salah satu konsep dasar dari pencegahan dan pendeteksian *Fraud* adalah *Fraud triangle*. Konsep ini disebut juga *Cressey's Theory* karena memang istilah ini muncul karena penelitian yang dilakukan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Penelitian Cressey diterbitkan dengan judul *Other's People Money: A Study in the Social Psychology of Embezzelent*. Penelitian Cressey ini secara umum menjelaskan alasan mengapa orang-orang melakukan *Fraud*. Ada tiga elemen *Fraud triangle*, antarlain: *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi), dan *Pressure* (tekanan) (Matus John Tirtawirya, 2021). Berikut ini *Fraud Triangle* divisualisasikan dalam Gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1 *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey

Sisi pertama dari segitiga tersebut disebut *Pressure* yang merupakan *perceived non shareable financial need*. Sisi keduanya disebut *perceived*

Opportunity. Sisi ketiga disebut *Rationalization*. *Fraud triangle* terdiri dari tiga elemen, yaitu : *Pressure*, *Opportunity*, dan *Rationalization*. Pada bagian ini akan dijelaskan bagian-bagian penting dari setiap elemen mendasar dari *Fraud triangle* tersebut (Matius John Tirtawirya, 2021).

a. *Pressure*

Menurut Albrecht et al dalam Titawirya (2021), *Pressure* dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu :

1. Tekanan Finansial (*Financial Pressures*)

Hampir 95% *Fraud* dilakukan karena adanya tekanan dari segi finansial. Tekanan finansial yang sering diselesaikan dengan mencuri (*Fraud*) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a) Keserakahan (*greedy*)
- b) Standar hidup yang terlalu tinggi (*living beyond one's means*)
- c) Banyaknya tagihan dan utang (*high bills or personal debt*)
- d) Kredit yang hampir jatuh tempo (*poor credit*)
- e) Kebutuhan hidup yang tidak terduga (*unexpected financial needs*)

2. Tekanan akan Kebiasaan Buruk (*Vices Pressures*)

Vices Pressures disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk, misalnya berhubungan dengan: judi, obat-obat terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Sebagai contoh, seseorang yang suka berjudi akan terdorong untuk melakukan apapun untuk memperoleh uang sebagai taruhan (*gambling*).

3. Tekanan yang Berhubungan dengan Pekerjaan (*Work-Related Pressures*)

Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya: kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan *Fraud* untuk memperoleh “imbalan” atas kerja kerasnya.

b. *Opportunity*

Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila *Fraud* yang dilakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Menurut Albrecht et al dalam Tirtawirya (2021) ada enam faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan *Fraud*, antara lain:

1. Kurangnya control untuk mencegah dan atau mendeteksi *Fraud*.
2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.
3. Kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku *Fraud*.
4. Kurangnya pengawasan terhadap akses informasi.
5. Ketidakpedulian dan ketidakmampuan mengantisipasi *Fraud*
6. Kurangnya jejak audit (*audit trail*)

c. *Rationalization*

Hampir semua *Fraud* dilatarbelakangi oleh *Rationalization*. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan *Fraud* pada akhirnya melakukannya. Rasionalisasi merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi (karena ada faktor lain) dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatan itu sebenarnya salah. Albrecht et al. dalam Tirtawirya (2021)

mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan *Fraud* antara lain :

1. Aset itu sebenarnya milik saya (*perpetrator's Fraud*)
2. Saya hanya meminjam dan akan membayarnya Kembali
3. Tidak ada pihak yang dirugikan
4. Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak
5. Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai
6. Saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu dapat meningkatkan standar hidup saya.

2.1.2 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

2.1.2.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Fraud adalah suatu kata yang jarang diketahui masyarakat. Namun, tanpa disadari di Indonesia, hampir setiap hari berita di media massa (cetak dan elektronik) memuat berbagai berita tentang *Fraud*. *Fraud* adalah suatu hal yang sering terjadi bukan hanya di kehidupan sehari-hari, pemerintahan bahkan di perusahaan publik. Sepintas *Fraud* merupakan suatu jenis penyimpangan yang terkesan sederhana namun *Fraud* menyimpan bentuk yang lebih kompleks dari bentuk yang sudah kita kenal selama ini.

Masyarakat awam cenderung mengartikan bahwa *Fraud* adalah korupsi. Padahal sebenarnya, *Fraud* itu memiliki banyak tipe termasuk salah satunya korupsi. Memang kasus yang sering terdengar saat ini serta menjadi “buah bibir” masyarakat adalah korupsi terutama yang melibatkan para petinggi negara ini. *Fraud* merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar,

tahu dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya : sumber daya perusahaan dan negara demi kenikmatan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut. *Fraud* berbeda dengan kesalahan yang tidak disengaja (*unintentional error*). Jika seorang secara tidak sengaja memasukkan data yang salah ketika mencatat suatu transaksi, maka itu tidak dapat dikatakan *Fraud* karena dilakukan dengan tidak sengaja. Tetapi, jika seseorang dengan kecerdikannya, merekayasa laporan keuangan untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi pada perusahaannya maka disebut *Fraud* (Khairani, 2025).

Fraud berbeda dengan perampokan (*robbery*). Perampokan dilakukan secara paksa dengan ancaman atau kekerasan dan disadari langsung oleh korban, sehingga dampak kerugiannya biasanya bersifat terbatas. Sebaliknya, *fraud* dilakukan secara halus dan terstruktur melalui penyajian fakta yang salah, sehingga korban sering tidak menyadari telah ditipu. *Fraud* umumnya terjadi pada organisasi besar, baik pemerintah maupun swasta, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Contohnya adalah kasus ENRON, di mana *fraud* menyebabkan kerugian material besar bagi investor dan karyawan, serta dampak psikologis yang berujung pada hilangnya nyawa. Pelaku *fraud* dalam kasus tersebut adalah direksi ENRON dan KAP Arthur Andersen, yang akhirnya ditutup dan mengubah *Big Five* menjadi *Big Four* (Khairani, 2025).

Menurut Albrecht et al dalam Tirtawirya (2021), "*Fraud is a generic term, and embraces all the multivarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false*

representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining Fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.”

Artinya, *Fraud* merupakan hal yang bersifat umum dan memiliki banyak makna, yang terjadi karena kecerdikan manusia dan ditujukan untuk satu pihak untuk memperoleh keuntungan lebih dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan khusus yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengartikan *Fraud* yang terdiri dari kejutan, penipuan, kelicikan dan cara yang tidak wajar yang digunakan sebagai cara untuk menipu orang lain. Satu-satunya cara untuk menjelaskannya adalah bahwa *Fraud* adalah hal yang merusak moral manusia (Tirtawirya, 2021).

2.1.2.2 Gejala Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)

Adapun gejala awal dari terjadinya *Fraud* adalah sebagai berikut :

1. Gejala Kecurangan pada Manajemen

Indikasi fraud meliputi ketidakharmonisan dalam pengambilan kebijakan, menurunnya kepercayaan dan motivasi karyawan, meningkatnya komplain dari pihak eksternal, kekurangan kas yang tidak jelas, penurunan kinerja perusahaan, serta peningkatan utang, piutang, dan persediaan yang tidak wajar.

2. Gejala Kecurangan pada Karyawan

Sementara itu, pada tingkat karyawan, gejala fraud antara lain pengeluaran keuangan tanpa dokumen pendukung, kesalahan pencatatan, hilangnya

bukti transaksi, ketidaksesuaian jumlah dan kualitas persediaan, harga persediaan yang tidak wajar, serta adanya penyesuaian pembukuan tanpa otorisasi manajemen.

Namun, setelah melalui kajian mendalam factor pemicu tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat yang sering disebut teori GONE, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan)
2. *Opportunity* (kesempatan)
3. *Need* (kebutuhan)
4. *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor *intern* (individu) yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor *Opportunity* dan *exposure* merupakan faktor generik (umum) yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban dari perbuatan kecurangan.

1. Faktor Generik

Perlu dipahami bahwa kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Risiko terjadinya kecurangan bergantung pada kedudukan pelaku dengan objek kecurangan. Secara umum, manajemen perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan *Fraud* daripada karyawan.

2. Faktor Individu

Faktor individu merupakan faktor yang melekat dalam diri seseorang. Faktor ini terdiri dari kebutuhan (*need*), dan keserakahan (*greed*). Kebutuhan yang muncul dalam diri setiap manusia, terutama yang sifatnya mendesak terkadang membuat manusia rela menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sedangkan keserakahan membuat manusia untuk memperoleh lebih dari apa yang sudah didapatkannya dengan cara ilegal.

2.1.3 Kompetensi Aparatur

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Aparatur

Kompetensi umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Kata dasarnya, "kompeten," berarti cakap, mampu, atau terampil. Dalam konteks manajemen Sumber Daya Manusia, kompetensi mengacu pada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Airswort, Smith, dan Millership menyatakan bahwa kompetensi adalah kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Riani, 2024).

Menurut Rudana dalam Riani (2024), kompetensi merujuk pada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*), dan kemampuan (*abilities*) yang dapat didemonstrasikan sesuai dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diamati melalui tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal tersebut. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi serta lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi

pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi dalam lingkungan kerja.

Menurut Robbins dalam Suryani (2021) kompetensi adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Laporan keuangan yang berkualitas tidak akan tercapai tanpa keterlibatan sumber daya manusia yang kompeten (Suryani, 2021). Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan, penting dilakukan berbagai upaya, seperti pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja. Kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan desa sangat mempengaruhi kualitas dan akuntabilitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan (Suryani, 2021).

Pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa didukung oleh hasil penelitian Sukmawati (2025) di desa Gedaren, Jatinom. Hasil serupa juga ditemukan oleh Benard J Situmeang, Renova Simanjatak (2023), serta Ni Wayan Dian Utami (2023). Untuk mendukung tujuan tersebut, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi sangat penting.

2.1.3.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea dalam Situmeang (2022), ada beberapa komponen yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk membentuk kompetensi:

1. Pengetahuan

Informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang tertentu.

2. Keterampilan

Kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin dengan baik dan maksimal.

3. Sikap

Perilaku seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Menurut Mathis dalam Sukmawati (2025), nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh individu. Berdasarkan penelitian Sukmawati (2025) ketika seseorang bekerja dengan maksimal tanpa memandang latar belakang, mereka dapat mengembangkan kompetensi mereka. Kemampuan sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja mereka. Selaras dengan penelitian Situmeang (2023) bahwa kompetensi aparatur mempengaruhi kecenderungan *fraud*.

2.1.3.4 Kualitas Sumber daya Manusia

Penyusunan laporan keuangan pemerintah desa sangatlah membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia juga harus memiliki pemahaman terhadap akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia adalah acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas karena dalam penyusunan laporan keuangan yaitu mereka yang sudah menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan“ (Situmeang, 2023).

Menurut Ni Wayan Dian Utami (2023) Kualitas Sumber Daya Manusia dapat diukur dengan beberapa teori yaitu :

1. Produktivitas

Dalam “mencapai produktivitas kinerja yang maksimum, organisasi atau pemerintahan harus memilih orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat serta dengan kondisi yang memungkinkan mereka bekerja secara optimal”

2. Sikap dan Perilaku

a. Sikap

Sikap yang perlu dikembangkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengenali berbagai hal yang berpengaruh terhadap organisasi yang sekarang dominan dampaknya terhadap organisasi.
- 2) Mampu mengidentifikasi perkembangan yang sedang terjadi dan menganalisis apakah bersifat sementara atau langgeng.
- 3) Mampu melihat kecenderungan yang timbul dan mengaitkannya dengan sasaran yang diinginkan.
- 4) Tidak sekedar memberikan reaksi terhadap situasi prolematik yang timbul.
- 5) Mampu berpikir dan bertindak proaktif.

b. Perilaku

Perilaku dapat memotivasi tujuan yang hendak dicapai:

- 1) Komunikasi

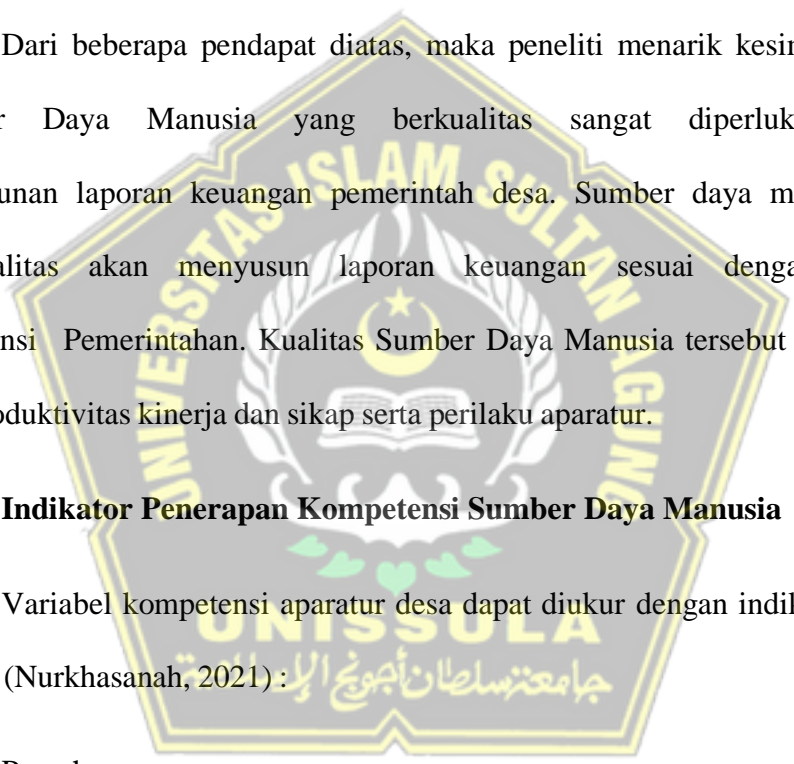
Komunikasi “dapat terjadi karena adanya komponen, yaitu komunikator mengirimkan pesan yang bisa diekspresikan melalui berbagai lamang dalam bentuk bahasa”.

2) Hubungan

Dengan“berhubungan baik berarti membuka peluang dan sekaligus mengikat simpul-simpul informasi dan menggerakkan kehidupan”.

Dari beberapa pendapat diatas, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas Sumber Daya Manusia tersebut dapat diukur dari produktivitas kinerja dan sikap serta perilaku aparatur.

2.1.1.4 Indikator Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel kompetensi aparatur desa dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Nurkhasanah, 2021): 

a. Pemahaman

Kompetensi aparatur desa harus memahami tentang pengelolaan dana desa.

b. Keahlian teknis

Kompetensi aparatur desa harus memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan dana desa.

c. Pelatihan

Aparatur desa diharapkan mengikuti pelatihan teknis agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.

d. Inisiatif dalam bekerja

Aparat desa harus memiliki inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada.

e. Kode etik kepegawaian

Aparat desa bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai.

2.1.4 Pengendalian Internal

Marciano et al (2021) pengendalian internal adalah sejumlah prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipenuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Sistem pengendalian internal merupakan suatu aturan yang dibuat oleh suatu organisasi dalam menjalani roda kegiatan yang terdapat di organisasi tersebut yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Terdapat empat elemen dalam pengendalian internal yaitu :

1. Struktur organisasi yang memisahkan akuntabilitas dan kewenangan,
2. Sistem organisasi dan prosedur pencatatan
3. Praktik yang sehat
4. Pegawai yang kinerjanya sesuai dengan kewajibannya

Sistem pengendalian internal adalah suatu cara mengatasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga dan memiliki peran yang penting di dalam

pengecegan dan pendeteksian adanya tindakan kecurangan (Risma, 2024). Adapun Komponen didalam sistem pengendalian internal yaitu terdapat 5 komponen menurut COSA (*Commitee of Sponsoring Organization*) komponen tersebut anantara lain:

1. *Control Invironment*

Lingkungan pengendalian merupakan suasana tempat yang akan mempengaruhi pengendalian dan kesadaran pada setiap individu

2. *Risk assesment* (penilaian/pemakaian resiko)

Merupakan suatu proses untuk menilai dan menganalisa resiko yang akan terjadi dan mempengaruhi tujuan dari organisasi/perusahaan

3. *Control activities* (aktivitas pengendalian)

Merupakan suatu prosedur yang mengarahkan individu di dalam manajemen untuk mencapai tujuan

4. *Information and communication* (informasi dan komunikasi)

Merupakan sistem yang dapat mengidentifikasi operasi pengendalian dan mengganti bagi kode etik profesi

5. *Monitoring* (Pemantauan)

Merupakan sistem yang memantau serta menilai kinerja internal control pada setiap waktu (Risma, 2024).

Subu et al (2024) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut :

1. Keamanan dalam laporan keuangan

2. Efektivitas dan efisiensi dari operasional
3. Pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan.

Jadi, sistem pengendalian internal secara potensial akan mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan melalui pengawasan dan meningkatkan proses pelaporan keuangan dan organisasional yang sama baiknya menjamin pemenuhan yang bersangkutan dengan hukum dan regulasi.

2.1.5 Whistle Blowing System

2.1.5.1 Pengertian *Whistle Blowing System*

Whistleblowing didefinisikan sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi (karyawan) atas praktik ilegal, tidak etis, atau tidak sah yang berada di bawah kontrol atasan mereka kepada pihak yang dapat mengambil tindakan. Definisi ini luas dipakai dalam penelitian tentang perilaku *whistle blowing* dalam organisasi (Khan, 2022).

Whistleblowing akan muncul saat terjadi konflik antara loyalitas karyawan dan perlindungan kepentingan public. Elias dalam Samudra (2025) menambahkan bahwa *whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Internal *whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan eksternal *whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan lalu memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

De George dalam Samudra (2025) menetapkan tiga kriteria whistleblowing yang adil, yaitu adanya potensi bahaya bagi pekerja atau kepentingan publik, pelaporan dilakukan terlebih dahulu kepada pihak internal yang berwenang, dan pelaporan kepada pihak eksternal dapat dibenarkan jika pelaporan internal tidak menghasilkan perbaikan. Sementara itu, Lewis (2025) memandang whistleblowing sebagai bagian dari strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas organisasi, karena pelaporan awal kepada manajemen memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki pelanggaran sebelum masalah berkembang lebih kompleks.

Menurut Anggraeni (2021) sistem *whistleblower* adalah proses pelaporan pelanggaran yang memungkinkan seseorang mengungkapkan tanda-tanda penipuan tanpa khawatir akan ancaman atau pembalasan. Pendekatan ini menekan penyimpangan dalam organisasi publik dengan bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial dan alat deteksi dini.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Rahmawati (2023) penerapan mekanisme whistleblower meningkatkan pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, penelitian lain menghasilkan temuan yang berbeda. Sistem whistleblower tidak selalu berdampak besar pada pencegahan penipuan, menurut Anlilua (2023) hal ini terutama berlaku jika sistem pelaporan tidak didukung oleh langkah-langkah perlindungan whistleblower yang kuat dan budaya pelaporan yang terbuka. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem whistleblowing dan tingkat kepercayaan dan partisipasi aparat sangat mempengaruhi keberhasilannya.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan whistleblowing system sebagai variable penting yang perlu diuji kembali, terutama dalam konteks pemerintahan desa yang memiliki struktur sosial dan budaya berbeda dengan organisasi publik lainnya.

2.1.5.2 Elemen *Whistle Blowing System*

Australian Standards 8000 dalam Anlilua (2023), menyatakan bahwa *whistleblowing system* terdiri dari tiga elemen, antara lain:

1. Elemen struktural

Dalam elemen struktural, *whistleblowing system* diharuskan memiliki komitmen kuat dari manajemen bahwa sistem ini dijamin berfungsi secara independen dan bebas intervensi. Selain itu juga, harus mempunyai komite atau organisasi khusus yang melaksanakan dan mempunyai *resources* yang handal. Dasar hukum perlindungan *whistleblower* termuat dalam UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan saksi, yang mencakup ancaman fisik, psikologis, dan tuntutan hukum.

2. Elemen operasional

Dalam elemen operasional, *whistleblowing system* diharuskan memiliki sistem komunikasi pelaporan yang cepat, dapat menjamin kerahasiaan, aman, dan mudah diakses oleh semua orang. Selain itu juga, harus memiliki *code of conduct* dan prosedur operasional standar dalam melaksanakan investigasi dan penindakan, serta mempunyai kompetensi untuk melakukan investigasi

dan mengerti hukum. Investigasi dan penindakan harus independen, bebas intervensi manajemen, dan berdasarkan bukti atau fakta yang jelas.

3. Elemen *maintenance*

Dalam elemen *maintenance*, *whistleblowing system* diharuskan memiliki pendidikan dan training yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan investigator. Selain itu, reliabilitas, keandalan, dan keamanan sistem komunikasi harus ditinjau secara berkala.

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa terdapat tiga elemen *whistleblowing system*. Elemen struktural merupakan elemen yang berisikan elemen-elemen infrastruktur *whistleblowing system*. Elemen operasional merupakan elemen yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur kerja *whistleblowing system*. Elemen *maintenance* merupakan elemen yang memastikan bahwa sistem pelaporan pelanggaran ini dapat berkelanjutan dan meningkat efektifitasnya. Adapun elemen-elemen tersebut untuk membangun, mengimplementasikan dan mengelola sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), dalam suatu organisasi, khususnya terkait dengan perlindungan pelapor.

2.1.5.3 Whistleblower Protection

Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan atau disebut *whistleblower protection* sebagai berikut (Anggraeni, 2021):

1. Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) yang independen, bebas dan rahasia.

2. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan
3. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor
4. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa *whistleblower protection* merupakan fasilitas dan jaminan perlindungan yang sudah termuat dalam undang-undang khusus bagi pelapor. Seorang *whistleblower* mungkin saja mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atas tindakan *whistleblowing* yang dilakukan. Oleh karena itu sudah seharusnya seorang *whistleblower* mendapatkan perlindungan (*whistleblower protection*).

2.1.5.4 Indikator *Whistle Blower System*

Mengadopsi penelitian Anggraeni (2021) indikator untuk mengukur besarnya intensi *whistleblowing* adalah sebagai berikut:

1. Kasus mengenai penyalahgunaan asset

Yaitu dengan menguji tingkat kemungkinan akan melaporkan kasus penggantian atas biaya penginapan perjalanan dinas atas suatu proyek pengadaan

2. Kasus mengenai korupsi

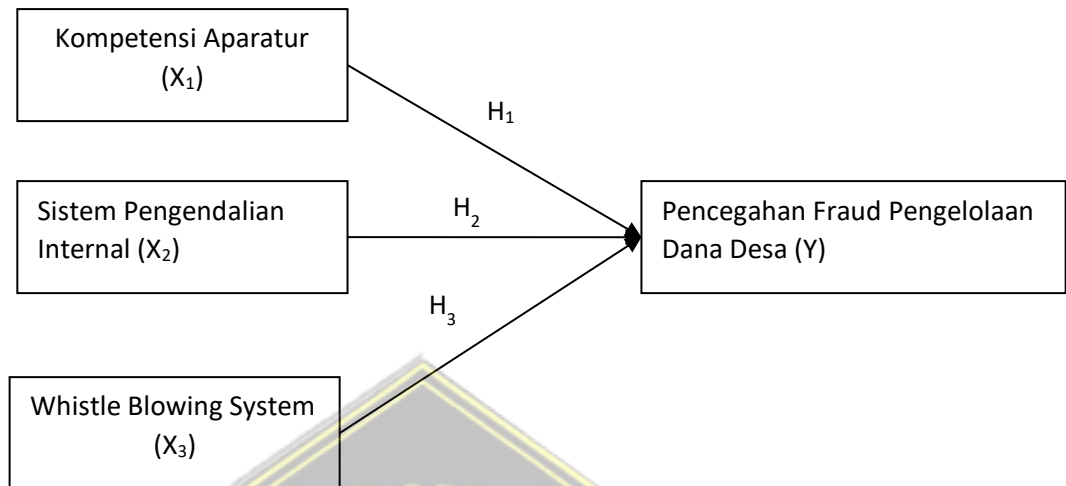
Yaitu dengan menguji tingkat kemungkinan akan melaporkan kasus pemberian cek oleh direktur perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan kepada kepala unit layanan pengadaan dengan tujuan agar perusahaannya dapat memenangkan proyek pengadaan.

3. Kasus mengenai *fraud*

Yaitu dengan menguji tingkat kemungkinan akan melaporkan kasus dugaan penggelapan uang pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui untuk mengukur besarnya intensi *whistleblowing* memiliki tiga indikator. Pengukuran tersebut menggunakan skenario kasus mengenai penyalahgunaan asset, korupsi dan *fraud*. Ketiga kasus tersebut mengukur bagaimana tingkat kemungkinan seseorang akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak internal kantor atau organisasi.

2.2 Kerangka Pikirian



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan terdahulu sebagai dasar melakukan kegiatan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ni Ketut Ayu Riani Putri, Baiq Kisnawati, (2024)	Metode Kuantitatif Analisis regresi linier berganda Variabel : a. Kepatuhan laporan keuangan b. kompetensi aparatur desa s. Sistem Pengendalian internal	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Gerung

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		d. <i>Whistleblowing system</i> e. Pencegahan Fraud	Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan kompetensi aparatur desa dan whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel independent mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 36.7% sedangkan sisanya sebesar 63.3% dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini.
2	Bernad J.M. Situmeang, (2022)	Metode Kuantitatif Analisis regresi linier berganda Variabel : Kompetensi aparatur ; system pengendalian internal ; moral sensitivity dan pencegahan fraud	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan <i>moral sensitivity</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.
3	Made Resmiani, I Putu Gede Diatmika, (2022)	Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linier Berganda Variabel : budaya organisasi, kompetensi SDM, efektifitas pengendalian internal, pencegahan fraud	Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, (2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, (3) efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan efektifitas pengendalian internal sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Lianita Puspita Dewi, Kunti Sunaryo, Retno Yulianti, (2022)	Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linier Berganda Variabel : kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas, whistleblowing, pencegahan fraud	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, moralitas individu, dan praktik akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan budaya organisasi dan <i>whistleblowing</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
5	Ni Kadek Purnama Dewi, Sang Ayu Putu Arie Indrawarawati, I Made Endra Lesmana Putra, Hita Akuntansi dan Keuangan, (2025)	Variabel Bebas : 1. Kompetensi Aparatur Desa 2. Sistem Pengendalian Internal 3. Whistle System 4. Moralitas Individu Variabel Terikat : 1. Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Metode : Kuantitatif Analisis Regresi Linier Berganda	Kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan, sedangkan moralitas individu dan <i>whistleblowing system</i> mempengaruhi pencegahan kecurangan.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Amanda Putri Rahmadani, Gatot Wahyu Nugroho, Evi Martaseli, (2023)	Variabel Bebas : 1. Kompetensi Aparatur 2. Pengendalian Internal 3. Whistle System Variabel Terikat : 1. Pencegahan Kecurangan Dana Desa	Hasil pengujian menggunakan software SPSS 25 for Windows secara parsial bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa dan untuk whistleblowing serta sistem pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, whistleblowing, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Hubungan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Ngawen Kabupaten Demak

Kompetensi aparatur mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Kompetensi ini mencakup kemampuan teknis, manajerial, serta pemahaman tentang regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan publik. Kompetensi yang baik pada aparatur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan mencegah terjadinya kecurangan. Aparatur yang kompeten dapat mengenali tanda-tanda awal dari potensi kecurangan. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap kecurangan dan mengambil tindakan preventif.

Aparatur yang berkompeten memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Mereka dapat menerapkan prosedur yang tepat untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kompetensi dalam pengendalian internal memungkinkan aparatur untuk merancang dan menerapkan prosedur pengendalian yang efektif, yang dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kompetensi dalam administrasi dan pelaporan keuangan memungkinkan aparatur untuk menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga memudahkan pengawasan dan audit.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetensi aparatur dan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik. Misalnya, penelitian oleh Amanda Putri Ramadani (2023) menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Serta penelitian oleh Ni Kadek Purnama Dewi

(2022) menghasilkan bahwa kompetensi aparaturnya berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam penggunaan dana desa.

H_1 : Kompetensi aparaturnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana desa

2.3.2 Hubungan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa Ngawen Kabupaten Demak

Pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pengendalian internal melibatkan prosedur dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi aset desa, mencegah dan mendeteksi kecurangan, serta memastikan akurasi dan keandalan laporan keuangan.

Menurut Teori Pengendalian Internal mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat adalah kunci untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Komponen utama dari pengendalian internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sedangkan Teori Agen menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik atau masyarakat) dan agen (pengelola atau aparaturnya). Pengendalian internal yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dan tidak melakukan kecurangan atau penyimpangan.

Pengendalian internal yang efektif dapat berkontribusi terhadap pencegahan kecurangan dana desa melalui beberapa cara berikut: (1) Lingkungan Pengendalian menciptakan budaya organisasi yang menekankan pentingnya integritas dan etika dalam pengelolaan dana desa. Lingkungan pengendalian yang positif mempengaruhi perilaku seluruh personel dalam organisasi dan mendorong kepatuhan terhadap aturan. (2) Penilaian Risiko, mengidentifikasi dan menganalisis risiko kecurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa. Dengan penilaian risiko yang baik, organisasi dapat merancang langkah-langkah pencegahan yang efektif. (3) Kegiatan Pengendalian, melaksanakan prosedur dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan rekonsiliasi akun. (4) Informasi dan Komunikasi, memastikan bahwa informasi yang relevan mengenai pengelolaan dana desa dikomunikasikan secara efektif kepada semua pihak yang berkepentingan. Informasi yang tepat waktu dan akurat memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kecurangan. (5) Pemantauan, melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan tetap relevan dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengendalian internal yang kuat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik. Misalnya, penelitian oleh Ni Ketut Ayu Riani (2021) dan Bernad J.M. Situmeang (2022) menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang baik dapat mengurangi risiko kecurangan secara signifikan.

***H₂*: Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana desa**

2.3.3 Hubungan *Whistle Blowing System* Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Ngawen Kabupaten Demak

Whistleblowing system adalah mekanisme yang memungkinkan individu untuk melaporkan tindakan yang melanggar hukum atau kebijakan organisasi, termasuk kecurangan, tanpa takut akan tindakan balasan. Sistem ini menyediakan saluran yang aman dan rahasia bagi pelapor untuk mengungkapkan informasi mengenai tindakan yang tidak etis atau ilegal.

Teori *Whistleblowing* mengemukakan bahwa keberadaan saluran pelaporan yang aman dan rahasia mendorong individu untuk melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran. *Whistleblowing system* yang efektif dapat mengurangi risiko kecurangan dengan memberikan deteksi dini dan memperkuat budaya etis dalam organisasi. *Whistleblowing system* memungkinkan deteksi dini terhadap tindakan kecurangan yang mungkin tidak terdeteksi oleh sistem pengendalian internal. Informasi dari pelapor dapat mengungkapkan kecurangan pada tahap awal sebelum merugikan desa secara signifikan. Dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia, pegawai merasa diberdayakan untuk melaporkan kecurangan tanpa takut akan tindakan balasan. Hal ini meningkatkan partisipasi seluruh anggota organisasi dalam pencegahan kecurangan. Informasi yang diperoleh melalui *whistleblowing system* membantu dalam penegakan aturan dan kebijakan yang berlaku. Tindak lanjut atas laporan kecurangan dapat mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. *Whistleblowing system* yang diimplementasikan

dengan baik dapat memperkuat budaya etis dalam organisasi. Organisasi yang transparan dan akuntabel mendorong pegawai untuk bertindak dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai etis.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa whistleblowing system yang efektif berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Misalnya, penelitian oleh Made Resmiani (2022) dan Lianita Puspita Dewi (2022) menunjukkan bahwa keberadaan *whistleblowing system* yang kuat dapat mengurangi insiden kecurangan dalam organisasi.

***H₃: Whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana desa**



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2024), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dan pengambilan sampel dilakukan secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, serta analisis data bersifat statistik. Paradigma penelitian kuantitatif dianggap sebagai hubungan sebab akibat (kausal) antar variabel penelitian (Sugiyono, 2024).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif yaitu penelitian dimana peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis serta penelaahan kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif (Sugiyono, 2024).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu pengaruh kompetensi aparatur, pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dana desa Ngawen Kabupaten Demak maka populasi yang diambil adalah seluruh aparatur desa Ngawen Kabupaten Demak dengan jumlah 40 karyawan.

Tabel 3.1 Data Narasumber

No	Nama	Jabatan	Wewenang
1	Mas'udi.A.Md	Kepala Desa	Memimpin pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa bersama BPD, mengelola keuangan dan aset desa, mengangkat perangkat desa, serta membina masyarakat di bidang pembangunan, ekonomi, sosial budaya, ketentraman, dan ketertiban
2	Nur Zen	Plt Sekertaris Desa	Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, dengan fungsi utama mengkoordinir urusan ketatausahaan, umum (administrasi kantor, aset, rapat, pelayanan umum), keuangan, serta perencanaan
3	Dwi Nur Agustin S.pd	Kasi Pemerintahan	Membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas operasional pemerintahan desa, meliputi manajemen tata praja, penyusunan regulasi, pembinaan pertanahan, ketentraman, kependudukan, penataan wilayah, pendataan profil desa, serta pelayanan administrasi pemerintahan desa
4	A Syafiq Fahmi ST	Kasi Kesejahteraan	Bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan operasional bidang kesejahteraan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta

No	Nama	Jabatan	Wewenang
			mengelola bantuan sosial dan administrasi.
5	Nur Faidah	Kaur Keuangan	Mengurus administrasi keuangan, verifikasi, dan administrasi penghasilan perangkat desa, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
6	Ali Rosin	Kaur Perencanaan	Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan desa, menginventarisir data pembangunan, memfasilitasi musyawarah perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan pelaksanaan pembangunan, bekerja di bawah Sekretaris Desa untuk mendukung administrasi dan pembangunan desa.
7	Ema Isrohmiyati S.pd	Kadus	Membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di wilayah dusun, yang meliputi pembinaan ketentraman & ketertiban, perlindungan masyarakat, pengelolaan wilayah, pengawasan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.
8	Sulaiman	BPD	Bertugas menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa.

No	Nama	Jabatan	Wewenang
9	Drs.Amin Rohani	LKMD	Membantu <u>memberdayakan masyarakat</u> , ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, serta meningkatkan pelayanan publik desa.
10	Faiz Muzzaki S.pd	RW	Sebagai jembatan antara warga dan pemerintah, membantu pelayanan publik, menjaga ketertiban dan kerukunan, mengoordinasikan RT, menggerakkan partisipasi serta swadaya masyarakat untuk pembangunan lingkungan melalui musyawarah.
11	Sukanan	RT	Melaksanakan tugas pelayanan masyarakat, membina kerukunan, serta menjadi jembatan antara warga dan pemerintah desa/kelurahan.

3.2.2 Sampel

Penulis memakai metode sensus untuk mengambil sampel. Menurut Widarjono (2015), *sensus* adalah metode pengambilan sampel dari seluruh anggota populasi. Pada penelitian ini, sampel penelitian sebesar 40 orang aparatur desa Ngawen Kabupaten Demak.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan pemecahan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, dikumpulkan menggunakan berbagai teknik seama

proses penelitian berlangsung. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer dapat diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan penyebaran kuesioner. Dalam penulisan ini diperoleh data yang diamati secara langsung di Desa Ngawen Kabupaten Demak adalah hasil data yang diambil dengan kuesioner kepada informan yaitu aparatur Desa Ngawen Kabupaten Demak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat berupa data jurnal penelitian sebelumnya, laporan keuangan perusahaan, studi pustaka dan sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2024) yang terdiri dari observasi dan kuesioner.

1. Questioner

Questioner adalah prosedur pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan penelitian. Angket adalah teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis atau bentuk angket dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Angket langsung yaitu apabila individu yang dikirim angket tersebut adalah orang yang secara langsung kita inginkan datanya.
- b. Angket tidak langsung yaitu apabila angket tersebut diberikan kepada seseorang untuk memperoleh data tentang orang lain.

Dalam penelitian ini, menggunakan angket terkait hubungan kompetensi aparatur, pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan dana Desa Ngawen Kabupaten Demak. Jenis-jenis angket ini peneliti memilih angket langsung. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Pertanyaan terbuka, adalah pertanyaan yang mengharapkan responden menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal. Sebaliknya pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang tersedia.

Berdasarkan bentuk pertanyaan yang digunakan maka peneliti menggunakan bentuk angket tertutup. Adapun skala yang digunakan dalam angket ini adalah skala likerts, menurut Sugiyono skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti akan

menggunakan skala likerts dengan memperhatikan skor pada jawaban peserta didik.

Nilai sesuai dengan skala likert, yaitu sebagai berikut :

- a. Jawaban sangat setuju mendapat skor :5
- b. Jawaban setuju mendapat skor :4
- c. Jawaban netral mendapat skor :3
- d. Jawaban tidak setuju mendapat skor :2
- e. Jawaban sangat tidak setuju mendapat skor : 1

3.5 Variabel dan Indikator

3.5.1 Variabel Kompetensi Aparatur

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kompetensi sangat penting untuk dimiliki setiap individu karena orang yang memiliki pengetahuan yang baik maka segala sesuatu yang dikerjakan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Keterampilan dan sikap merupakan suatu bagian dari kompetensi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin tinggi skor berarti semakin tinggi kompetensi terhadap pencegahan *fraud*.

Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki. Kapasitas pengetahuan yang dimiliki akan memudahkan para pegawai untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi saat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. (A. Maulana, 2020).

3.5.2 Variabel Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu prosedur untuk melindungi aset. Sistem pengendalian internal ini bisa dikatakan sebuah aturan yang wajib diterapkan serta diikuti oleh para pegawai. Karena lemahnya sistem pengendalian internal sehingga muncullah kecurangan. Tujuan sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan yang wajar pada perolehan tingkat keandalan dan kemampuan laporan keuangan yang memadai untuk menyusun laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal yang buruk akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan tentu tidak dapat mencegah terjadinya kecurangan (Paristu, 2014). Dengan demikian, maka sistem pengendalian internal dikatakan penting dalam sebuah Desa untuk menjaga atau mengontrol aset Desa tersebut (Safitri et al., 2021) Menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang di Desa.

3.5.3 Variabel Whistle Blowing System

Robert (2008) mendefinisikan whistleblowing sebagai suatu tindakan pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu pelanggaran yang menyalahi hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. Dengan demikian praktik atau tindakan kecurangan dapat dilakukan oleh karyawan atau manajemen perusahaan. Seseorang yang melakukan tindakan pelaporan kecurangan disebut dengan whistleblower.

3.5.4 Variabel Pencegahan Kecurangan

Kecurangan merupakan suatu bentuk yang disengaja dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan mendapatkan keuntungan tidak halal atau melanggar hukum. Pencegahan *fraud* bisa dianalogikan dengan sebuah penyakit yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati karena jika *fraud* sudah terjadi maka akan menimbulkan kerugian yang besar akan tetapi, jika kita cegah maka akan meminimalisir *Fraud*. Salah satu contoh tindakan *fraud* yaitu menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang, baik dari dalam maupun dari luar organisasi, kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. (Hardinto et al., 2020) Menyatakan bahwa individu yang jujur mampu menolak godaan suap, dan khususnya ketika ada pemimpin atau pejabat yang jujur dan mampu menolak godaan suap. Namun, jika suap yang diberikan dalam jumlah yang besar, sedangkan peluang tertangkapnya sangat kecil dan sanksi hukumannya ringan, maka di prediksi banyak pemimpin dan pejabat tergoda menerima suap (Ariga, 2018).

Tabel 3.2 Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Jml Pertanyaan
Kompetensi Aparatur	Alat perilaku (<i>behaviour tools</i>)	1. Pengetahuan 2. Keterampilan	1.Saya memahami peraturan dan prosedur pengelolaan keuangan di instansi saya 2. Saya mengetahui standar dan ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan 3. Saya mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Variabel	Dimensi	Indikator	Jml Pertanyaan
			4. Saya memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola dan mencatat transaksi keuangan
	Sikap (<i>Image Attribute</i>)	3. Konsep Diri	5. Saya merasa bertanggung jawab atas setiap tugas pengelolaan keuangan yang saya lakukan 6. Saya menilai diri saya sebagai aparatur yang profesional dalam menjalankan tugas keuangan
	Karakteristik pribadi (<i>Personal Characteristic</i>)	4. Motif	7. Saya termotivasi untuk bekerja jujur dan mematuhi aturan dalam pengelolaan keuangan 8. Saya memiliki komitmen pribadi untuk mencegah terjadinya kecurangan keuangan
Pengendalian Internal	Lingkungan pengendalian	1. Kebijakan dan praktik SDM 2. Integritas dan nilai etika	9. Rekrutmen dan penempatan pegawai keuangan telah mempertimbangkan kompetensi yang sesuai 10. Nilai etika dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas keuangan
	Aktifitas pengendalian	3. Perubahan dalam lingkungan operasi	11. Perubahan kebijakan atau sistem kerja selalu disesuaikan dengan prosedur pengendalian internal
	Informasi dan komunikasi	4. Komunikasi internal 5. Sistem evaluasi kinerja	12. Komunikasi antar bagian berjalan efektif dalam mendukung pengendalian internal 13. Kinerja pegawai dievaluasi secara objektif dan berkala
	Pemantauan	6. Perencanaan waktu 7. Pengawasan	14. Setiap kegiatan pengelolaan keuangan memiliki perencanaan waktu yang jelas

Variabel	Dimensi	Indikator	Jml Pertanyaan
			15. Pengawasan atas pengelolaan keuangan dilakukan secara rutin
<i>Whistle Blowing System</i>	Efektifitas penerapan	1. Kondisi untuk melakukan pelaporan 2. Respon instansi 3. Adanya akses pelaporan pengawas eksternal	16. Tidak ada tekanan atau ancaman bagi pegawai yang ingin melaporkan pelanggaran 17. Setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku 18. Tersedia akses pelaporan kepada pengawas eksternal
	Cara pelaporan	4. Mekanisme internal 5. Mekanisme eksternal	19. Mekanisme pelaporan internal mudah dipahami oleh pegawai 20. Pelaporan eksternal dapat dilakukan tanpa hambatan administrasi
	Manfaat	6. Cara penyampaian informasi penting dan kritis 7. Timbul keangasan melakukan pelanggaran 8. Mekanisme deteksi dini pelanggaran 9. Kesempatan penanganan secara internal 10. Pengurangan resiko akibat pelanggaran 11. Meningkatkan reputasi 12. Memberikan masukan kepada organisasi	21. Whistleblowing system membantu menyampaikan informasi penting dan kritis 22. Keberadaan whistleblowing system membuat pegawai enggan melakukan pelanggaran 23. Whistleblowing system mampu mendeteksi pelanggaran sejak dini 24. Pelanggaran dapat ditangani secara internal sebelum berkembang lebih luas 25. Whistleblowing system memberikan masukan yang bermanfaat bagi organisasi 26. Penerapan whistleblowing system meningkatkan reputasi organisasi. 27. Whistleblowing system mampu mengurangi risiko akibat pelanggaran

Variabel	Dimensi	Indikator	Jml Pertanyaan
Pencegahan Kecurangan (Fraud)	<i>Incentive/Pressure</i>	1. Masalah keuangan 2. Terlibat pelanggaran yang tidak sesuai norma 3. Tekanan dari pekerjaan	28. Pemisahan tugas dan wewenang di instansi Anda mampu mencegah terjadinya kecurangan keuangan 29. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara transparan sehingga memperkecil peluang kecurangan 30. Pengawasan yang dilakukan atasan langsung mampu menutup celah terjadinya manipulasi laporan keuangan
	<i>Opportunity</i>	4. Sistem pengendalian internal yang lemah 5. Tata kelola organisasi buruk	31. Sistem pengendalian internal di instansi saya menutup peluang terjadinya kecurangan 32. Tata kelola organisasi yang baik mengurangi kesempatan melakukan kecurangan
	<i>Rationalization</i>	6. Budaya organisasi yang salah 7. Normalisasi kecurangan	33. Pegawai meyakini bahwa segala bentuk kecurangan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun 34. Pegawai menyadari bahwa kecurangan tetap merupakan pelanggaran meskipun dilakukan untuk kepentingan organisasi 35. Nilai-nilai etika organisasi mampu mencegah pegawai membenarkan tindakan kecurangan 36. Budaya organisasi mendukung perilaku jujur dan anti kecurangan 37. Kecurangan tidak dianggap sebagai hal yang wajar di lingkungan kerja

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Instrumen

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur syah atau valid tidaknya suatu kuesioner suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Alat uji yang digunakan untuk menguji validitas adalah korelasi antara *score* masing-masing butir pertanyaan dengan *total score*. Ketentuan valid atau tidaknya ditentukan dengan nilai *r*, jika *r* hitung > *r* tabel maka pertanyaan tersebut dianggap valid dan apabila *r* hitung < *r* tabel maka pertanyaan tersebut dianggap tidak valid

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Dilakukan untuk mengakui konsisten kontruk dan variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu suatu varibel dikatakan reliabel jika memiliki Alpha > 0,6 (Ghozali, 2013).

3.6.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur, pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan dana Desa Ngawen Kabupaten Demak.

Persamaan umum untuk mengetahui regresi berganda adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_2$$

Dimana :

a = Konstanta

Y = Pencegahan Kecurangan Dana Desa

X_1 = Kompetensi aparatur

X_2 = Pengendalian Internal

X_3 = *Whistleblowing system*

b = Koefisien Regresi

e = variable pengganggu

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Uji t

Untuk mengetahui signifikansi dari hasil penelitian maka perlu dilakukan beberapa uji sebagai berikut :

Pengujian hipotesis secara parsial dalam penelitian ini menggunakan kriteria, yaitu:

Perumusan Hipotesis

- H_0 : $b_1, b_2, b_3, b_4 = 0$, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat
- H_a : $b_1, b_2, b_3, b_4 \neq 0$, yang berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat

menentukan kriteria pengujian

H_a ditolak apabila signifikansi $> 0,05$

H_a diterima apabila signifikansi $< 0,05$

3.6.3.2 Uji F

Uji F berguna untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang sudah ada dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2009). Ketentuan:

Uji F diterima apabila $\text{sig} < \alpha = 0,05$

Uji F ditolak apabila $\text{sig} > \alpha = 0,05$

3.6.4 Analisis Koefisien Determinan

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan satu. Nilai koefisien determinasi kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013)

Dalam penelitian ini menggunakan adjusted R square, karena menurut Ghozali (2013) kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat. Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan menggunakan adjusted R square pada saat mengevaluasi model regresi. Tidak seperti R², nilai adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Ngawen Kecamatan Wedung

4.1.1 Profil Desa Ngawen Kecamatan Wedung

Desa Ngawen merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Desa Ngawen termasuk dalam kawasan pesisir utara Kabupaten Demak yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya khas wilayah pesisir. Letak geografis Desa Ngawen relatif strategis karena berada dalam jangkauan pusat pemerintahan kecamatan serta memiliki akses yang cukup memadai ke wilayah desa lain di sekitarnya.

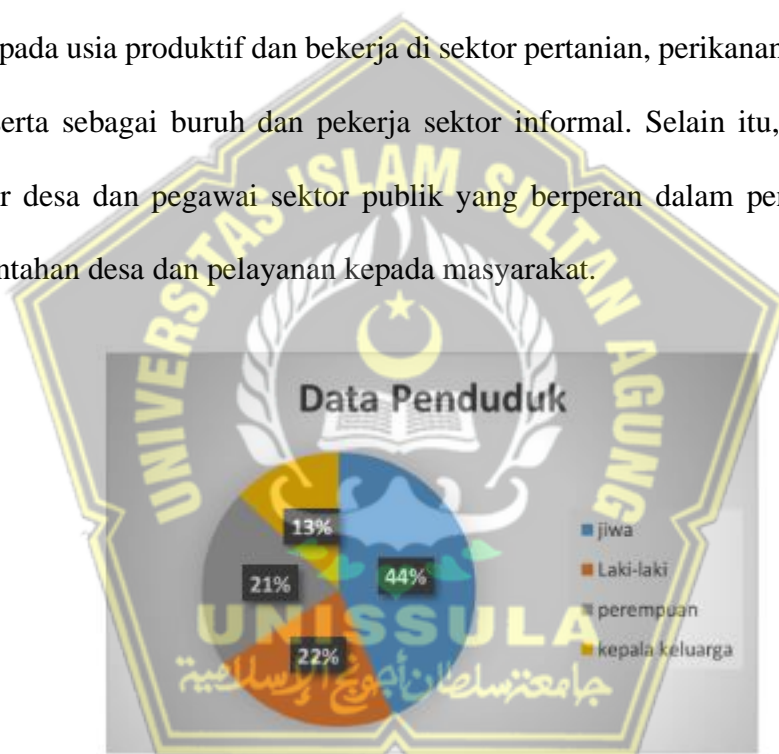


Gambar 4.1 Peta Desa Ngawen Kec. Wedung

Secara topografis, Desa Ngawen didominasi oleh wilayah dataran rendah dengan kondisi tanah yang relatif datar. Kondisi ini mendukung aktivitas

masyarakat di sektor pertanian, perikanan, serta usaha ekonomi berbasis sumber daya alam pesisir. Sebagian wilayah desa dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut, sehingga masyarakat setempat telah beradaptasi dengan lingkungan alam tersebut dalam pola kehidupan dan mata pencaharian sehari-hari.

Dari aspek demografis, penduduk Desa Ngawen terdiri dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Sebagian besar penduduk berada pada usia produktif dan bekerja di sektor pertanian, perikanan, perdagangan kecil, serta sebagai buruh dan pekerja sektor informal. Selain itu, terdapat pula aparatur desa dan pegawai sektor publik yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 4.2 Data Penduduk Desa Ngawen Kec. Wedung

Struktur pemerintahan Desa Ngawen dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah

Desa Ngawen mengelola berbagai program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Kehidupan sosial masyarakat Desa Ngawen ditandai dengan hubungan sosial yang cukup erat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta gotong royong. Berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan masih rutin dilaksanakan, baik dalam bentuk kegiatan keagamaan, kerja bakti, maupun kegiatan sosial lainnya. Nilai-nilai budaya lokal dan religiusitas juga masih kuat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan karakteristik tersebut, Desa Ngawen merupakan wilayah yang relevan untuk dijadikan lokasi penelitian, khususnya penelitian yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal, serta upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kondisi sosial dan pemerintahan desa yang dinamis memberikan ruang yang memadai untuk melakukan kajian empiris secara komprehensif.

4.1.2 Visi Dan Misi Desa Ngawen Kecamatan Wedung

Berikut adalah visi dari Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak :

“Terwujudnya Desa Ngawen yang Religius, Berprestasi, Sejahtera, Mandiri dan Manadi”

Filosofis dari visi di atas adalah :

- Religius mempunyai makna bahwa masyarakat yang mengamalkan dan mematuhi ajaran-ajaran agama, sehingga terciptanya peradaban yang baik dan terwujudnya umat yang terbaik;
- Berprestasi yaitu masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia mampu berkompetisi di segala bidang;
- Sejahtera mengandung maksud bahwa kehidupan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya;
- Mandiri adalah masyarakat yang mampu membangun dengan semangat gotong royong yang tinggi dan berkeaktifitas untuk mendorong proses pembangunan; dan
- Madani yaitu masyarakat yang kehidupannya berasaskan tertib hukum dan sadar politik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokrasi.

Sedangkan dalam rangka mencapai visi, maka perlu adanya misi antara lain :

1. Membangun aparatur pemerintahan desa yang amanah, tertib, dan berprestasi menuju pemimpin yang berwawasan.
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan.
3. Mengembangkan kemampuan SDM menuju pembangunan yang seutuhnya dan mendorong peningkatan peranan wanita dan peranan pemuda serta dalam pengembangan.
4. Terpeliharanya keharmonisan antar etnis dan toleransi antar agama serta stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan desa.

5. Menetapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu percepatan pembangunan daerah.
6. Melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat yang bernilai tinggi serta memupuk rasa cinta terhadap kebudayaan sendiri.
7. Menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Ngawen Kecamatan Wedung

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada pada Desa Ngawen Kecamatan Wedung. Karakteristik responden berguna untuk menguraikan deskripsi identitas responden menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan. Karakteristik responden yang diteliti kemudian dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Karakteristik responden dalam bentuk tabel sebagai berikut :

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

NO	KATEGORI	JUMLAH	%
1	< 20 Tahun	0	0%
2	21-30 Tahun	7	18%
3	31-40 Tahun	18	45%
4	41-50 Tahun	13	33%
5	> 50 Tahun	2	5%
	Total	40	100%

Sumber : Data yang diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.1 karakteristik responden, diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 40 orang. Responden terbanyak berada pada rentang usia 31–40 tahun, yaitu sebanyak 18 orang (45%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur Desa Ngawen berada pada usia produktif dan matang secara pengalaman kerja, sehingga dinilai memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawab organisasi. Responden dengan usia 41–50 tahun berjumlah 13 orang (33%), yang menunjukkan adanya aparatur dengan pengalaman kerja yang cukup panjang dan berpotensi memberikan kontribusi dari sisi kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, responden dengan usia 21–30 tahun sebanyak 7 orang (18%), yang mencerminkan keterlibatan generasi muda dalam pemerintahan desa, terutama dalam hal administrasi dan pemanfaatan teknologi. Sementara itu, responden dengan usia di atas 50 tahun hanya berjumlah 2 orang (5%), dan tidak terdapat responden berusia di bawah 20 tahun (0%). Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa didominasi oleh tenaga kerja usia dewasa yang telah memenuhi syarat usia kerja serta memiliki tingkat kedewasaan yang memadai. Secara keseluruhan, distribusi usia responden menunjukkan bahwa aparatur Desa Ngawen didominasi oleh kelompok usia produktif, sehingga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa secara efektif dan profesional..

4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KATEGORI	JUMLAH	%
1	Wanita	19	52.5%

NO	KATEGORI	JUMLAH	%
2	Pria	21	47.5%
	Total	40	100%

Sumber : Data yang diolah, 2026.

Berdasarkan tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa dari keseluruhan responden, sebagian besar berjenis kelamin wanita, yaitu sebanyak 19 orang (52,5%). Sementara itu, responden berjenis kelamin pria berjumlah 21 orang (47,5%). Komposisi ini menunjukkan bahwa partisipasi aparatur desa dalam penelitian relatif seimbang antara pria dan wanita, meskipun jumlah responden wanita sedikit lebih dominan. Hal ini mengindikasikan adanya keterlibatan perempuan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat. Secara keseluruhan, distribusi jenis kelamin responden yang relatif proporsional diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang beragam, sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan representatif.

4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KATEGORI	JUMLAH	%
1	S2	0	0%
2	S1	19	47.5%
3	D3	6	15%
4	SMA	15	37.5%
	Total	40	100%

Sumber : Data yang diolah, 2026.

Berdasarkan tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa dari 40 responden yang diteliti, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S1, yaitu sebanyak 19 orang (47,5%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur Desa Ngawen telah memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi, yang diharapkan mampu mendukung kualitas kinerja dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Selanjutnya, responden dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 15 orang (37,5%), yang mencerminkan masih adanya aparatur desa dengan latar belakang pendidikan menengah atas, namun tetap berperan aktif dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat. Responden dengan tingkat pendidikan D3 berjumlah 6 orang (15%), yang menunjukkan adanya aparatur dengan pendidikan vokasi yang mendukung keterampilan teknis dan operasional di lingkungan pemerintahan desa. Sementara itu, tidak terdapat responden dengan tingkat pendidikan S2 (0%). Secara keseluruhan, komposisi tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa aparatur Desa Ngawen didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi dan menengah, sehingga diharapkan mampu menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa.

4.2.2 Uji Instrumen

4.2.2.1 Uji Validitas

Ketentuan validitas instrumen sah/valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Validitas bertujuan untuk menguji apakah instrumen benar benar suatu faktor yang valid untuk digunakan sebagai alat ukur. Nilai r standar dilihat dari *corrected*

Item Total Correlation, jika nilainya lebih dari r tabel maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut valid.

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk $df = n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada studi ini terdapat konstruk dengan sampel (n)=40 dan besarnya df dapat dihitung $40 - 2 = 38$ dengan df 38 dan α 0,05 didapatkan r tabel = 0,3120. Hasil dari uji validitas masing-masing variabel dalam studi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	r (hitung)	r (tabel)	Status
Kompetensi	X1.1	0,912	0,3120	VALID
	X1.2	0,889	0,3120	VALID
Aparatur	X1.3	0,930	0,3120	VALID
	X1.4	0,936	0,3120	VALID
	X1.5	0,895	0,3120	VALID
	X1.6	0,913	0,3120	VALID
	X1.7	0,942	0,3120	VALID
	X1.8	0,935	0,3120	VALID
Pengendalian Internal	X2.1	0,932	0,3120	VALID
	X2.2	0,884	0,3120	VALID
	X2.3	0,910	0,3120	VALID
	X2.4	0,945	0,3120	VALID
	X2.5	0,891	0,3120	VALID
	X2.6	0,865	0,3120	VALID
	X2.7	0,921	0,3120	VALID
Whistle Blowing System	X3.1	0,858	0,3120	VALID
	X3.2	0,891	0,3120	VALID
	X3.3	0,896	0,3120	VALID

Variabel	Instrumen Penelitian	r (hitung)	r (tabel)	Status
	X3.4	0,948	0,3120	VALID
	X3.5	0,883	0,3120	VALID
	X3.6	0,898	0,3120	VALID
	X3.7	0,901	0,3120	VALID
	X3.8	0,853	0,3120	VALID
	X3.9	0,901	0,3120	VALID
	X3.10	0,890	0,3120	VALID
	X3.11	0,911	0,3120	VALID
	X3.12	0,904	0,3120	VALID
Pencegahan Fraud	Y1	0,932	0,3120	VALID
	Y2	0,918	0,3120	VALID
	Y3	0,924	0,3120	VALID
	Y4	0,876	0,3120	VALID
	Y5	0,906	0,3120	VALID
	Y6	0,940	0,3120	VALID
	Y7	0,900	0,3120	VALID
	Y8	0,930	0,3120	VALID
	Y9	0,914	0,3120	VALID
	Y10	0,911	0,3120	VALID

Sumber : Olah data SPSS, 2026.

Dari **Tabel 4.4** di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap variabel kompetensi aparatur, pengendalian internal, *whistle blowing system* dan pencegahan *fraud* dikatakan valid apabila r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,3120). Sehingga dapat disimpulkan bahwa item pada instrumen penelitian valid semua.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu kuesioner dalam mengukur stabilitas kuesioner apabila kuesioner tersebut digunakan

dari waktu ke waktu. Reliabilitas merupakan instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, untuk menguji reliabilitas dalam instrumen studi ini menggunakan *Cronbach Alpha* > 0,60. Berikut hasil uji reliabilitas dalam studi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Kompetensi Aparatur (X_1)	0,802	0,6	Reliabel
Pengendalian Internal (X_2)	0,807	0,6	Reliabel
<i>Whistle Blowing System</i> (X_3)	0,784	0,6	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,792	0,6	Reliabel

Sumber : Olah data SPSS, 2026.

Secara keseluruhan, semua variabel yang diuji (Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal, *Whistle Blowing System* dan Pencegahan *Fraud*) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,6, yang menunjukkan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan untuk masing-masing variabel adalah reliabel. Artinya, instrumen tersebut konsisten dalam mengukur setiap variabel yang diteliti.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan data atau tidak karena tidak semua data dapat diterapkan dengan regresi. Pengujian yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Analisis parametrik seperti regresi linear terdapat syarat bahwa data harus terdistribusi dengan normal (Priyatno, 2010). Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya *parametric-test*. Dalam penelitian uji normalitas data yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusannya digunakan pedoman jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,49741225
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,076
	Negative	-,054
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil SPSS uji normalitas dengan Kolmogorov smirnov menunjukkan nilai Asymp.Sig. (2-Tailed)=0,200 dimana nilai sig > 0,05 artinya hasil uji model regresi tersebut berdistribusi normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dimana suatu model regresi dapat dinyatakan baik ketika tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan dalam studi ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collineary Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
- Kompetensi Aparatur	0,350	2,385	Bebas multikolinieritas
- Pengendalian Internal	0,310	3,719	Bebas multikolinieritas
- <i>Whistle Blowing System</i>	0,350	2,651	Bebas multikolinieritas

Variabel Dependen :
Pencegahan *Fraud*

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji multikolinieritas di atas maka disimpulkan bahwa pada setiap variabel dapat dikatakan baik karena tidak terjadi hubungan atau korelasi antar variabel bebas sehingga tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF < 10,00 dan nilai Tolerance > 0,10.

4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berikut merupakan hasil uji heterokedastisitas dalam studi ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,314	,622		2,112	,042
Kompetensi Aparatur	-,114	,116	-,853	-,985	,331
Pengendalian Internal	-,146	,151	-,902	-,971	,338
Whistle Blowing System	-,017	,080	-,181	-,208	,837

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *spearman rho* di atas menunjukkan hasil bahwa setiap variabel memiliki nilai sig > 0,05 yang artinya pada pengujian model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan perluasan dari analisis regresi sederhana yang digunakan untuk membangun hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Studi ini menggunakan variabel Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal, *Whistle Blowing System* dan Pencegahan *Fraud*. Hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,111	,994		,111	,912
Kompetensi Aparatur	,591	,186	,476	3,185	,003
Pengendalian Internal	,351	,141	,590	2,562	,028
Whistle Blowing System	,515	,128	,605	4,031	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diinterpretasikan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,591 X_1 + 0,351 X_2 + 0,515 X_3 + e$$

Hasil uji analisis regresi di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien regresi Kompetensi Aparatur sebesar 0,592 dengan nilai positif, artinya bahwa variabel Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*. Jika Kompetensi Aparatur yang diterima oleh pelanggan baik, maka tingkat Pencegahan *Fraud* semakin tinggi pula.
- b. Nilai koefisien regresi Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*. Jika tingkat Pengendalian Internal yang dilakukan organisasi semakin tinggi, maka tingkat Pencegahan *Fraud* semakin tinggi pula.
- c. Nilai koefisien regresi *Whistle Blowing System* sebesar 0,515 dengan nilai positif, artinya bahwa variabel *Whistle Blowing System* berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*. Jika tingkat *Whistle Blowing System* yang dilaksanakan semakin baik, maka tingkat Pencegahan *Fraud* semakin tinggi.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara personal dalam menerapkan berbagai variasi dari variabel independen. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan t hitung terhadap t tabel atau nilai signifikansi t. Berikut adalah hasil dari uji t dalam model studi ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji t

Pengaruh Antar Variabel	T hitung	T Tabel	Sig	Keterangan
Kompetensi Aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	3,185	1,668	0,003	H ₁ diterima
Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	2,562	1,668	0,028	H ₂ diterima
<i>Whistle Blowing System</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	4,031	1,668	0,000	H ₃ diterima

Sumber : Olah data SPSS, 2026

a. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil pengujian antara Kompetensi Aparatur dan Pencegahan *Fraud* diperoleh nilai t hitung $3,185 > 1,668$ yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel dan sig $0,003 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Kompetensi Aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* dapat diterima.

b. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil pengujian antara Pengendalian Internal dan Pencegahan *Fraud* diperoleh nilai t hitung $2,652 > 1,668$ yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel dan sig $0,028 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* dapat diterima.

c. Pengaruh *Whistle Blowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil pengujian antara *Whistle Blowing System* dan Pencegahan *Fraud* diperoleh nilai t hitung $4,031 > 1,668$ yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel dan $\text{sig } 0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Whistle Blowing System* memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan *Whistle Blowing System* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* dapat diterima.

4.2.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan signifikansi nilai F hitung $> F$ tabel. Hasil Uji F dalam studi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3001,528	3	1000,509	411,885	,000 ^b
	Residual	87,447	36	2,429		
	Total	3088,975	39			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud
b. Predictors: (Constant), Whistle Blowing System, Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa hasil F hitung pada model regresi sebesar 411,885 dan signifikansi 0,000 dimana F hitung $> F$ tabel dan $\text{sig } < 0,05$. Hal tersebut artinya bahwa Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal dan *Whistle Blowing System* secara bersama-sama mempengaruhi Pencegahan *Fraud*.

4.2.6 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi dalam studi ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,986 ^a	,972	,969	1,55856

a. Predictors: (Constant), Whistle Blowing System, Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan hasil bahwa model regresi variabel kompetensi aparatur, pengendalian internal dan *whistle blowing system* mampu menjelaskan variabel pencegahan *fraud* dengan nilai sebesar 97,2% sedangkan sisanya sebesar 2,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kompetensi Aparatur Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Kompetensi aparatur menggambarkan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Sementara itu, pencegahan *fraud* merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, baik dalam pengelolaan keuangan desa maupun dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, kompetensi aparatur

menjadi faktor penting karena aparatur desa memegang peran langsung dalam pengelolaan dana dan pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur desa, maka semakin besar kemampuan desa dalam mencegah terjadinya kecurangan. Aparatur yang memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas, peraturan, dan prosedur kerja akan lebih mampu menjalankan pekerjaannya secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara teoritis, kompetensi merupakan karakteristik dasar individu yang berhubungan dengan efektivitas kinerja. Spencer dan Spencer (1993) menyatakan bahwa kompetensi mencakup motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan yang mendorong seseorang untuk bertindak secara konsisten dan bertanggung jawab. Dalam konteks pencegahan fraud, aparatur yang kompeten cenderung memiliki kemampuan untuk mengenali potensi risiko, memahami sistem pengendalian, serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Robbins dan Judge (2017) menjelaskan bahwa individu yang memiliki kompetensi tinggi akan menunjukkan perilaku kerja yang lebih profesional dan etis. Aparatur desa yang memahami pengelolaan keuangan, regulasi desa, serta prinsip akuntabilitas akan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan tindakan fraud, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dengan kata lain,

kompetensi aparatur berperan sebagai benteng awal dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Kompetensi aparatur memiliki keterkaitan erat dengan unsur *rationalization* dalam teori *fraud triangle*. *Rationalization* merujuk pada pembenaran diri yang dilakukan individu untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan. Aparatur dengan tingkat kompetensi yang rendah cenderung lebih mudah melakukan pembenaran atas tindakan yang menyimpang, misalnya dengan alasan ketidaktahuan terhadap aturan atau anggapan bahwa tindakan tersebut masih dapat ditoleransi.

Sebaliknya, aparatur yang memiliki kompetensi tinggi, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja, akan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap aturan dan tanggung jawabnya. Pemahaman ini membuat aparatur lebih sulit untuk melakukan pembenaran atas tindakan fraud karena mereka menyadari konsekuensi hukum dan etika dari perbuatannya. Dengan demikian, kompetensi aparatur berperan dalam menekan unsur *rationalization*, sehingga kecenderungan melakukan fraud dapat diminimalkan.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Robbins dan Judge (2017) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki kompetensi dan pemahaman kerja yang baik cenderung menunjukkan perilaku etis dan bertanggung jawab. Selain itu, Albrecht et al. (2019) juga menegaskan bahwa rendahnya pemahaman terhadap aturan dan prosedur dapat meningkatkan peluang terjadinya rasionalisasi perilaku fraud. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan

bimbingan teknis menjadi langkah penting dalam pencegahan fraud di pemerintahan desa.

Peningkatan kompetensi aparatur desa Ngawen Kecamatan Wedung dilakukan melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa, bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, pelatihan etika aparatur, serta pelatihan manajemen risiko. Pelatihan tersebut membantu aparatur meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga potensi terjadinya fraud dapat ditekan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi aparatur merupakan faktor fundamental dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtaza dan Al Suwaidi (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia di sektor publik memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan pencegahan fraud. Aparatur yang kompeten terbukti mampu menjalankan sistem pemerintahan dengan lebih transparan dan bertanggung jawab.

4.3.2 Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, termasuk dalam hal pencegahan kecurangan. Pencegahan fraud berkaitan erat dengan sejauh mana organisasi mampu mengendalikan aktivitas internalnya melalui kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam

pemerintahan desa, pengendalian internal menjadi alat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan pengendalian internal di desa, maka semakin kecil peluang terjadinya fraud. Sistem pengendalian internal yang baik mampu membatasi ruang gerak aparatur untuk melakukan penyimpangan karena setiap aktivitas diawasi dan memiliki prosedur yang jelas.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013), pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan berfungsi untuk mencegah serta mendeteksi kesalahan maupun kecurangan dalam organisasi. Dalam konteks desa, pengendalian internal yang efektif dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, sistem otorisasi, pencatatan keuangan yang tertib, serta pengawasan berkelanjutan.

Pengendalian internal berkaitan langsung dengan unsur *opportunity* dalam teori *fraud triangle*. *Opportunity* menggambarkan adanya celah atau kesempatan yang memungkinkan individu melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Dalam organisasi yang memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, peluang terjadinya *fraud* akan semakin besar karena minimnya pengawasan dan ketidaktegasan prosedur.

Pengendalian internal yang kuat mampu mempersempit kesempatan aparatur untuk melakukan *fraud*. Pembagian tugas yang jelas, sistem otorisasi yang ketat, pencatatan yang tertib, serta pengawasan yang berkelanjutan akan membatasi ruang gerak aparatur dalam melakukan penyimpangan. Dengan demikian, pengendalian internal berfungsi sebagai alat utama dalam menekan unsur *opportunity* dalam *fraud triangle*.

Menurut COSO (2013), pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, termasuk dalam mencegah kecurangan. Selain itu, Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa lemahnya pengendalian internal merupakan salah satu faktor utama yang membuka peluang terjadinya *fraud*, khususnya di sektor publik. Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan *fraud* di pemerintahan desa.

Teori agensi juga menjelaskan pentingnya pengendalian internal dalam mencegah *fraud*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik kepentingan antara pihak pengelola dan pihak yang berkepentingan dapat menimbulkan potensi penyimpangan. Oleh karena itu, pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi dan menekan perilaku oportunistik aparatur.

Dalam praktik pemerintahan desa Ngawen Kecamatan Wedung, pengendalian internal dapat diperkuat melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP), penggunaan sistem keuangan desa, serta pelaksanaan

audit dan evaluasi secara berkala. Selain itu, pelatihan mengenai pengendalian internal dan tata kelola keuangan desa juga diperlukan agar aparatur memahami peran dan tanggung jawabnya dalam sistem pengendalian tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustikasari dan Sucipto (2020) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud di sektor publik. Dengan sistem pengendalian yang kuat, risiko kecurangan dapat diminimalkan dan pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan.

4.3.3 *Whistle Blowing System* Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Whistle blowing system merupakan mekanisme pelaporan yang memungkinkan individu dalam organisasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Pencegahan *fraud* tidak hanya bergantung pada sistem pengawasan formal, tetapi juga pada keberanian individu untuk mengungkap penyimpangan. Dalam pemerintahan desa, *whistle blowing system* menjadi sarana penting untuk mendeteksi *fraud* yang sulit terjangkau oleh pengawasan struktural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistle blowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem pelaporan yang jelas, aman, dan terpercaya mampu mendorong aparatur untuk melaporkan dugaan kecurangan, sehingga tindakan *fraud* dapat dicegah sejak dini. Aparatur juga akan lebih berhati-hati dalam bertindak karena

menyadari adanya mekanisme pelaporan yang dapat digunakan apabila terjadi penyimpangan.

Menurut Near dan Miceli (2016), *whistle blowing* adalah pengungkapan oleh anggota organisasi terhadap praktik ilegal, tidak etis, atau tidak sah kepada pihak yang berwenang. Sistem ini berfungsi sebagai alat pengawasan informal yang sangat efektif karena informasi yang dilaporkan biasanya berasal dari orang dalam yang memahami kondisi organisasi. Dengan adanya *whistle blowing system*, organisasi dapat mendeteksi *fraud* lebih cepat sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Selain itu, Vinten (2002) menyatakan bahwa *whistle blowing system* dapat membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi transparansi dan integritas. Dalam lingkungan kerja yang memiliki budaya terbuka, aparatur akan lebih berani melaporkan pelanggaran karena merasa dilindungi dan dihargai. Hal ini sangat relevan dalam pemerintahan desa yang memiliki hubungan kerja yang dekat dan cenderung menghindari konflik.

Whistle blowing system memiliki keterkaitan dengan dua unsur dalam teori *fraud triangle*, yaitu *pressure* dan *opportunity*. Dari sisi *opportunity*, keberadaan *whistle blowing system* yang efektif dapat memperkecil kesempatan terjadinya *fraud* karena aparatur menyadari bahwa setiap penyimpangan berpotensi dilaporkan oleh pihak internal. Hal ini menciptakan efek jera dan meningkatkan kehati-hatian aparatur dalam bertindak.

Dari sisi *pressure*, *whistle blowing system* juga berperan dalam menyalurkan tekanan yang dialami aparatur. Tekanan kerja, tekanan ekonomi, atau tekanan dari atasan sering kali menjadi pemicu terjadinya *fraud*. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang aman dan terlindungi, aparatur memiliki sarana untuk melaporkan tekanan atau perintah yang menyimpang tanpa harus terlibat langsung dalam tindakan *fraud*. Dengan demikian, *whistle blowing system* membantu mengurangi tekanan yang dapat mendorong terjadinya *fraud*.

Menurut Near dan Miceli (2016), *whistle blowing system* memungkinkan individu melaporkan praktik tidak etis atau ilegal secara aman dan rahasia, sehingga dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Vinten (2002) juga menyatakan bahwa sistem pelaporan yang efektif mampu menciptakan budaya transparansi dan menekan tekanan sosial yang mendorong individu melakukan kecurangan. Oleh karena itu, penerapan *whistle blowing system* yang baik sangat penting dalam mendukung pencegahan fraud di pemerintahan desa.

Agar *whistle blowing system* berjalan efektif, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, jaminan perlindungan bagi pelapor, serta pelatihan etika dan integritas aparatur. Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa melaporkan pelanggaran bukanlah tindakan yang merugikan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, *whistle blowing system* tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya anti-*fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kim dan Ko (2012) yang menyatakan bahwa mekanisme pelaporan internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan peningkatan transparansi organisasi. Keberadaan *whistle blowing system* terbukti mampu menekan praktik *fraud*, khususnya di sektor publik.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi dan pembahasan yang telah dilakukan terkait pengaruh kompetensi aparatur, pengendalian internal dan *whistle blowing system* terhadap pencegahan *fraud*, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik mampu memahami aturan, prosedur, serta tanggung jawabnya dengan lebih tepat, sehingga kecil kemungkinan melakukan pembenaran (*rationalization*) terhadap tindakan kecurangan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya *fraud* di pemerintahan desa.
2. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian internal yang efektif mampu mempersempit kesempatan (*opportunity*) terjadinya kecurangan melalui pembagian tugas yang jelas, prosedur kerja yang tertib, serta pengawasan yang berkelanjutan. Semakin baik penerapan pengendalian internal, semakin kecil peluang aparatur untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa.
3. *Whistle blowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Keberadaan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya

dapat mendorong aparaturnya untuk melaporkan dugaan kecurangan serta mengurangi tekanan (*pressure*) dan kesempatan melakukan *fraud*. *Whistle blowing system* juga berperan dalam membangun budaya transparansi dan integritas, sehingga mampu mendukung upaya pencegahan fraud secara berkelanjutan di pemerintahan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka diberikan beberapa saran yang diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Ngawen disarankan untuk meningkatkan kompetensi aparaturnya melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa, pemahaman regulasi, dan etika kerja agar aparaturnya mampu menjalankan tugas secara profesional dan meminimalkan potensi terjadinya *fraud*.
2. Desa Ngawen perlu memperkuat sistem pengendalian internal dengan menerapkan SOP yang jelas, pemisahan tugas, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala guna memperkecil peluang terjadinya kecurangan.
3. Pemerintah desa disarankan untuk mengoptimalkan *whistle blowing system* melalui sosialisasi, penyediaan saluran pelaporan yang aman, serta perlindungan bagi pelapor agar pencegahan *fraud* dapat dilakukan secara lebih efektif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berikut keterbatasan dalam penelitian :

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kompetensi aparatur, pengendalian internal, dan *whistle blowing system*, sehingga belum mencakup faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi pencegahan *fraud*, seperti budaya organisasi, integritas individu, atau komitmen pimpinan.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada aparatur Desa Ngawen Kecamatan Wedung, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas ke desa lain yang memiliki karakteristik organisasi dan tata kelola yang berbeda.
3. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, sehingga sangat bergantung pada kejujuran dan persepsi responden. Kondisi ini memungkinkan adanya adanya subjektivitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 85–92.
- Biduri, S. (2022). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4021–4036.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1085>
- Dewi, L., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI, PRAKTIK AKUNTABILITAS, DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9, 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Dewi, N. K. P. (2022). Pengaruh Kompetensi, SPI, Moralitas dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(6), 134–142.
- Fadillah, R. (2024). Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(2), 133–140.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Indraswarawati, S. A. P. A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal HITA Akuntansi Dan Keuangan*, 6(4), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32795/pkhm2e48>
- Khan, J. (2022). Examining whistleblowing intention: The influence of rationalization on wrongdoing and threat of retaliation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1752.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph19031752>
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 20, 130–137.
<https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.130-137>
- Matus John Tirtawirya. (2021). Pengaruh Segitiga Kecurangan untuk Mengidentifikasi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Variabel Moderasi Penerapan Integrasi Teknologi Industri. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Manajemen*, 2(3), 179–194.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.108>
- Nurkhasanah. (2021). Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan Kerja Dan Kompetensi

Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 210–216.

- Peby Anlilua. (2023). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal KIAFE*, 1(3), 34–48.
- Prakoso, M. I. (2023). Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(1), 283–306.
<https://doi.org/http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Puspita, L. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas dan Whistle Blowing dalam Pengelolaan Dana Desa (studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Rahmadani, A. P. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 15(2), 1–10.
- Rahmawati, H. (2023). INTERNAL WHISTLEBLOWING INTENTIONS AMONG INDONESIAN CIVIL SERVANTS. *Jurnal Riset Akuntansi Kotemporerq*, 15(1), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jrak.v15i1.6577>
- Resmiani, M. (2022). Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jap.v13i02.26368>
- Riani, K. (2024). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Valid*, 22(1), 115–123.
<https://doi.org/10.53512/valid.v22i1.488>
- Risma, O. (2024). Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Internal dan Teknologi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Menurut Perspektif Islam (Studi Pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–10.
- Rozak, D. A. (2022). Peranan Strategi Anti Fraud dan Audit Kepatuhan Dalam Mencegah Fraud Pada Inspektorat Kabupaten Ciamis. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 46–55.
- Simanjuntak, R. (2023). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. *Journal of Economics and Business*, 13(1),

86–99.

- Siti Khairani. (2025). Corporate Governance and Fraudulent Financial Reporting: The Role of Independence Figure. *Jurnal ECo-Fin*, 7(1), 247–260.
<https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2031>
- Situmeang, B. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Sesityty Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Aset*, 5(1), 25–36.
- Suandani, N. Y. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 1(1), 1–30.
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sukmawati, A. (2025). PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI DAN PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIANJUR. *Jurnal Tata Kelola Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 23–34.
- Suryani, N. (2021). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Widiana Bhakti Persada.
- Utami, N. W. D. (2023). ENGARUH KOMPETENSI, PRAKTEK AKUNTABILITAS DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 20–25.
- Yulian, T. N. (2022). Pengaruh Moralitas, Asimetri Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dana Desa Pada Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–10.